UNIVERSITAS GADJAH MADA
KRIMINALISASI PROSTITUSI PADA PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN IMPLEMENTASINYA
MUHAMMAD AL ASYHARI, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., (HR) Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
ABSTRACT x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Keaslian Penelitian 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21
A. Tinjauan Umum mengenai Kriminalisasi Tindak Pidana Prositusi ... 21
B. Tinjauan Umum mengenai Hak Asasi Manusia 37
C. Tinjauan Umum mengenai Peraturan Daerah 46
BAB III METODE PENELITIAN 58
A. Jenis dan Sifat Penelitian 58
B. Data/Bahan Penelitian 61
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data 63
D. Lokasi dan Subyek Penelitian 65
E. Jalannya Penelitian 67
F. Analisis Data 69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 71
A. Kriminalisasi Prostitusi dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 71

KRIMINALISASI PROSTITUSI PADA PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN IMPLEMENTASINYA
MUHAMMAD AL ASYHARI, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., (HR) Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

1. Kriminalisasi Prostitusi dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Ketertiban Umum 71
2. Perspektif Hak Asasi Manusia atas Kriminalisasi Prostitusi dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum 96

B. Implementasi Ketentuan Pidana Atas Tindak Pidana Prostitusi dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum 113

1. Praktik Prostitusi di Kota Depok Pasca Lahirnya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum 113
2. Implementasi Ketentuan Pidana atas Tindak Pidana Prostitusi dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum 123

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 138

A. Kesimpulan 138

B. Saran 139

DAFTAR PUSTAKA 141